

Press Release

Abai Gambut di Restorasi, Ancaman Karhutla Muncul Kembali

2 Maret 2023

Jakarta – Ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengintai di tahun 2023, namun respons pemerintah sama menyesakkannya. Presiden Jokowi mengulangi ancaman seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 untuk mencopot pejabat TNI dan Polri jika kebakaran besar terjadi. Ancaman ini seolah menjadi kegiatan seremonial tahunan dan mengindikasikan pemerintah gagal paham dan belum menyentuh solusi untuk menangani akar masalah karhutla. Setidaknya terdapat dua masalah mendasar pada pernyataan tersebut.

“Pertama, pemerintah gagal memahami akar permasalahan karhutla. Akibatnya penanganan karhutla hanya berfokus pada pemadaman api tanpa menyentuh masalah substantif, yaitu kerusakan ekosistem gambut yang memperparah dampak kebakaran. Kebijakan perlindungan ekosistem gambut pun direduksi dengan hadirnya UU Cipta Kerja (Peppu) yang justru memberi kelonggaran pada kasus keterlanjuran di kawasan hutan. Data dari BPK menyebutkan setidaknya 2,9 juta hektare perkebunan sawit beroperasi di dalam kawasan hutan secara tidak sah,” papar Wahyu A Perdana, Juru kampanye Pantau Gambut.

“Kedua, lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan karhutla terjadi secara berulang di lokasi yang sama. Selama periode 2015-2019 telah terakumulasi 1,4 juta hektare gambut yang terbakar, dimana 70% (1,02 juta hektare) terjadi di dalam area konsesi dan 36% (527,9 hektare) terbakar lebih dari satu kali¹. Situasi menjadi semakin kompleks ketika Mahkamah Agung memenangkan Pengajuan Kembali (PK) yang diajukan oleh Presiden Jokowi di tahun 2022 pada gugatan Citizen Law Suit (CLS) karhutla di Kalimantan Tengah yang sebelumnya telah dimenangkan warga pada 2019. Jelas ini adalah cerminan melemahnya kekuatan hukum dalam menangani kasus karhutla,” imbuh Wahyu.

Untuk menanggulangi karhutla dan melakukan langkah korektif pada kebijakan dan tindakan pemerintah, Pantau Gambut merilis sebuah studi berjudul **Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 pada Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia**.

Temuan Pantau Gambut

Almi Ramadhi, Peneliti dan Analis Data Pantau Gambut menjelaskan, “Pada studi yang menggunakan dataset tahun 2015 hingga 2019 ini, Pantau Gambut menemukan bahwa **16,4 juta hektare area gambut di Indonesia rentan terbakar**, dimana area seluas 3,8 juta hektare masuk ke dalam kategori kerentanan tinggi (*high risk*) dan 12,6 juta hektare tergolong ke dalam kerentanan sedang (*medium risk*).”

Kelas Kerentanan	Gambut		Total Keseluruhan
	Area Gambut BBSDLP 2019	Non-Area Gambut BBSDLP 2019	
High risk	2.533.782,86	1.310.462,85	3.844.243,48
Medium risk	4.714.648,95	7.893.676,62	12.608.309,49
Low risk	3.313.408,82	4.435.701,45	7.765.938,38
Total	10.561.841	13.639.841	24.218.491

¹ <https://pantaugambut.id/publikasi/membedah-teka-teki-kegiatan-perlindungan-ekosistem-gambut-di-area-berizin>

Jika melihat dari proporsi area KHG yang rentan terbakar, **Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan KHG rentan terbanyak, diantaranya 97% dari total 1.421 hektare area KHG Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik berada pada tingkat kerentanan tinggi.** Sementara jika merujuk pada sisi luasan area, Pantau Gambut menemukan **wilayah dengan risiko tinggi terluas berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan total luasan lebih dari 1,13 juta hektare² yang tersebar pada 13 KHG.** Ironisnya, KHG Sungai Kahayan–Sungai Sebangau dengan daerah *high risk* terluas ini berada di dalam lokasi eks-PLG (Proyek Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektare pada masa Soeharto dan saat ini sebagian eks-PLG menjadi bagian dari proyek Food Estate.

Pantau Gambut juga melakukan analisis titik panas (*hotspot*) menggunakan tiga citra satelit dengan seluruh tingkat kepercayaan, dan mencatat kemunculan 1.275 hotspot, dengan indikasi karhutla pada total empat minggu, terhitung sejak bulan Januari hingga Februari 2023. Yang perlu menjadi perhatian adalah 381 titik panas berada di wilayah *high risk* dan 520 titik panas pada wilayah *medium risk*.

Almi menutup, “Temuan-temuan di atas mengindikasikan adanya korelasi antara ekosistem gambut, kerentanan karhutla, dan kebakaran berulang.” Lebih lagi, kerentanan tinggi juga ditemukan pada lokasi eks-PLG Kalimantan Tengah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih sejak proyek ini gagal 20 tahunan silam. Kondisi ini seharusnya menjadi upaya untuk mengoreksi kebijakan dan mengevaluasi konsesi (khususnya yang beroperasi di atas lahan gambut). Upaya mitigasi karhutla juga tidak sebatas pernyataan yang bersifat seremonial semata, namun harus sistematis dan menyentuh akar persoalan. Sehingga kebijakan tidak lagi terkesan sporadis dan seremonial saja ketika ancaman ada di depan mata.

Catatan

Paparan Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 pada Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia per tanggal 2 Maret 2023 dapat diakses melalui tautan [berikut](#).

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Wahyu A Perdana 082112395919 Campaigner Pantau Gambut
Yoga Aprillianno 081390203344 Media Campaigner Pantau Gambut

Website pantaugambut.id
Email ask@pantaugambut.id
Instagram & Twitter @pantaugambut

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Publik bisa memantau berbagai isu mengenai lahan gambut melalui data yang tersaji dalam *platform* ini. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata

² Studi ini meletakkan skala prioritas kerentanan di atas 20.000 hektare pada kategori risiko kerentanan berdasar keluasan lahan dengan kerentanan tinggi.

publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.